

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, KEBIJAKAN LOKAL BALI, DAN EMANCIPATORY ACCOUNTING

I Putu Sudana

Universitas Udayana, Jl. P.B. Sudirman, Denpasar-80232
Surel: putusudana@yahoo.co.id

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7017>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 7
Nomor 2
Halaman 156-323
Malang, Agustus 2016
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
30 Mei 2016
Tanggal Revisi:
26 Juli 2016
Tanggal Diterima:
24 Agustus 2016

Abstrak: Sustainable Development, Kebijakan Lokal Bali, dan Emancipatory Accounting. Penelitian ini bertujuan memahami kaitan antara konsep emansipasi dalam *sustainable development* dan kebijakan lokal Bali *Tri Hita Karana*, serta implikasinya bagi *emancipatory accounting*. Konsep penelitian yang diadopsi adalah *critical research* dengan *qualitative content analysis* dan *reflective approach* sebagai alat analisisnya. Simpulan penelitian ini adalah *sustainable development* memperjuangkan emansipasi ekosistem, intragenerasi, dan antargenerasi. *Spiritual development* merupakan jiwa bagi setiap perjuangan emansipatif karena manusia adalah makhluk imanen dan transenden. Sebagai implikasinya, upaya pengembangan *emancipatory accounting* harus didasarkan pada dualitas karakter ini dan harus tercermin dalam setiap perjuangan emansipatif para akuntan.

Abstract: Sustainable Development, Balinese Local Wisdom, and Emancipatory Accounting. This study is aimed to comprehend interrelationship between emancipation concepts in sustainable development and Balinese local wisdom *Tri Hita Karana*, and its implication to emancipatory accounting. Framed with critical research, qualitative content analysis and reflective approach, data analysis was conducted. It concludes that sustainable development is struggling for emancipations to ecosystem, intrageneration and intergeneration. Spiritual development must become the foundation of emancipatory struggles since human beings are immanent and transcendent creature. Development of emancipatory accounting must be based on this understanding and must be reflected in the emancipative struggles of accountants.

Kata kunci: *Emancipatory Accounting, Spiritualitas, Sustainable Development, Tri Hita Karana.*

“Emancipatory accounting research and practice may be falling short of not only effectively addressing the social injustices and environmental crises that it is concerned about, but also of realizing of the full emancipatory potentialities of accounting practice because it has neglected, in various ways, to make spiritual realization the heart of its practice” (Molisa 2011 :453).

Terminologi *emancipatory accounting* yang digunakan oleh Molisa (2011) menunjukkan bahwa akuntansi adalah penge-

tahuan yang dapat membebaskan umat manusia dari *social injustices* maupun *environmental crisis*. Pengurangan, bahkan penghentian, merupakan permasalahan penting yang diperjuangkan dalam *sustainable development*. Dengan demikian, saya merasa sangat beralasan untuk menyatakan bahwa agenda *sustainable development* adalah sebuah proyek emansipasi yang memandang dan menempatkan umat manusia sebagai pusat kajian. Konsep ini dapat dengan mudah ditemukan pada sumber tekstual pemikiran *sustainable development* yang dipublikasikan oleh badan-badan internasional di bawah naungan *United Nations*. Frasa-frasa berikut dapat menjadi

representasi yang jelas: *man is both creature and moulder of his environment* (UNCHE 1972: Proklamasi No.1); *man's capability to transform his surroundings* (UNCHE 1972: Proklamasi No. 3); *our message is directed towards people* (WCED 1987:16); dan *human beings are at the centre of concerns for sustainable development* (UNCED 1992: Prinsip No. 1). Pemikiran-pemikiran tersebut dengan tegas merepresentasikan pengakuan atas posisi sentral umat manusia dalam agenda *sustainable development* sekaligus kapasitas transformatif yang dimilikinya.

Molisa (2011) menyatakan bahwa perjuangan-perjuangan emansipatif dapat dengan mudah kehilangan potensinya apabila menegasikan *spiritual realization* sebagai jantung dari perjuangannya. Hal ini menyiratkan bahwa manusia harus dipahami sebagai makhluk imanen dan transenden. Manusia tidak dapat dipisahkan dari unsur spiritualitas yang merupakan sisi transenden yang melekat pada dirinya. Setiap agenda yang mengadopsi *sustainable development* sebagai spirit akan gagal mencapai sasaran apabila umat manusia tidak memiliki tingkat kesadaran spiritual yang dibutuhkan. Orr (2002) berkeyakinan bahwa kemauan dan kemampuan dalam mencapai tingkat spiritualitas yang lebih tinggi merupakan tantangan sesungguhnya bagi umat manusia dalam upayanya mencapai sasaran *sustainable development*. Senada dengan pendapat tersebut, Molisa (2011) juga meyakini bahwa akuntansi merupakan sebuah pengetahuan yang membebaskan. Potensi emansipatif pengetahuan akuntansi mensyaratkan untuk dilakukannya pengikisan atas upaya alienasi spiritual dan terus menerus mempromosikan upaya *spiritual development* pada individu dan masyarakat (Shapiro 2009). Hal ini telah sejak lama diperjuangkan oleh berbagai agama di dunia.

Garner (2003) dan Orr (2002) memiliki kesepahaman bahwa dalam ajaran agama-agama terkemuka di dunia terkandung prinsip spiritualitas tentang harmoni kehidupan, yakni *wisdom, love, compassion, understanding, dan empathy*. Prinsip spiritualitas tersebut dapat mengandung nilai emansipasi, yang merupakan pedoman berharga bagi umat manusia dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis dalam ekosistem. Ketika prinsip spiritualitas tersebut diadopsi oleh suatu komunitas dan secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi, prinsip tersebut dapat berkembang

menjadi kebijakan lokal (*local wisdom*) yang mengakar sangat kuat dan *embedded* pada Praktik kehidupan sehari-hari. Bila dipraktikkan dengan sungguh-sungguh, prinsip tersebut (apalagi kalau sudah menjadi kebijakan lokal) dapat menuntun umat manusia ke dalam perilaku-perilaku emansipatif. Perilaku-perilaku tersebut dapat mendorong tercapainya harmoni kehidupan, persis seperti yang dicita-citakan dan diperjuangkan dalam agenda *sustainable development* (McDaniel 2003). Pada prinsip spiritualitas agama-agama besar di dunia terdapat nilai emansipatif yang dapat membawa umat manusia ke dalam harmoni kehidupan. Sebagai salah satu religi tertua di dunia (dengan pengikut yang besar), saya rasa menarik dan penting untuk dipahami bagaimana pandangan Hindu tentang konsep harmoni kehidupan ini.

Menurut Wiana (2007:5), kitab suci Hindu dapat dengan mudah ditemukan petunjuk tentang bagaimana umat manusia dapat membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, alam lingkungan, dan sesamanya. *Bhagawad Gita* adalah salah satu kitab suci Hindu yang secara eksplisit memuat petunjuk tersebut. Dalam Sloka 3.10 kitab suci ini (Prabhupada, 1972:171), terdapat pemikiran yang mengajarkan hal berikut ini:

“Saha-yajnah prajah srstva purovaca prajapatih, anena prasavisyadhvam esa vo ‘stvista kama-dhuk.

(Berbahagialah engkau dengan *yadnya* ini sebab pelaksanaannya akan menganugerahkan segala sesuatu yang dapat diinginkan untuk hidup secara bahagia dan mencapai pembebasan)”.

Sloka tersebut memberikan petunjuk bahwa kebahagiaan dan pembebasan dapat dicapai melalui *yadnya* (korban suci dengan tulus ikhlas). Umat manusia dapat menciptakan dan mempertahankan harmoni antara dirinya dengan Tuhan (*Prajapati*), alam lingkungan (*Kamadhuk*), serta sesama manusia (*Praja*) melalui *yadnya*. Konsep harmoni dalam ajaran Hindu ini kemudian terkenal dengan istilah *Tri Hita Karana* (THK) dan dipahami sebagai salah satu kebijakan lokal yang mengalir dalam tata kehidupan masyarakat Bali. Istilah tersebut dimunculkan di Bali pada tahun 1960-an (Ashrama, 2005:29; Wirawan 2011:1). Secara etimologis, *Tri Hita*

Karena berarti tiga penyebab kebahagiaan (Wiana, 2007:5; Wirawan, 2011:2). Demi mewujudkan kebahagiaannya, umat manusia harus mengupayakan melalui pembebasan atau emansipasi sehingga dapat menciptakan terjadinya harmoni antara dirinya dengan Tuhan, alam lingkungan, dan sesama. Tanpa harmoni, kebahagiaan bagi umat manusia tidak akan tercipta. Sloka tersebut juga menegaskan bahwa hanya dengan *yadnya* harmoni tersebut dapat diciptakan dan dipertahankan oleh umat manusia. Sebagai filsafat kehidupan, THK mengajarkan kepada umat manusia untuk mengembangkan sikap hidup yang benar dengan selalu melaksanakan *yadnya* untuk mengusahakan terjaganya harmoni kehidupan. Karena merupakan filsafat kehidupan, THK telah berkembang menjadi budaya masyarakat dan bahkan menjadi budaya organisasi yang tercermin dalam realitas-realitas bisnis. Hal ini dicermati oleh Sudarma (2013) dan Dwirandra (2012:111) yang dalam studinya menyimpulkan bahwa diadopsinya THK sebagai budaya organisasi dapat memicu berkembangnya Praktik bisnis yang ditujukan untuk memelihara harmoni antar manusia (melalui aktivitas ekonomi dan sosial), antara manusia dan alam lingkungan (melalui aktivitas pelestarian dan perbaikan ekosistem), serta antara manusia dan Tuhan (melalui aktivitas spiritual religius).

Dalam kaitannya dengan praktik bisnis, peran penting akuntansi tentu tak terbantahkan. Kalimat klise "*accounting is the language of business*" sudah dikenal secara luas (Gaffikin 2008:156). Praktik bisnis emansipatif dengan mengadopsi THK sebagai spiritunya, membutuhkan bahasa yang mampu menyuarakan emansipasi dan harmoni. Dengan kata lain, *emancipatory business practices* harus difalisitasi oleh *emancipatory accounting* sebagai katalisatornya. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengembangkan *emancipatory accounting* dan menemukan karakteristik-karakteristik yang harus dilekatkan kepadanya. Dengan dilatari oleh pemikiran-pemikiran tersebut, terdapat alasan yang sangat memadai untuk melakukan sebuah kajian tentang kaitan antara konsep emansipasi yang diperjuangkan dalam agenda *sustainable development* dan kebijakan lokal Bali (THK) yang bersumber dari ajaran spiritual Hindu, serta implikasinya bagi pengembangan *emancipatory accounting*.

METODE

Asumsi filosofis yang diadopsi dalam studi ini adalah bahwa umat manusia merupakan makhluk imanen dan sekaligus makhluk transenden. Cara pandang ini digunakan oleh Molisa (2011) dalam studinya yang bertema refleksi spiritual tentang emansipasi dan akuntansi. Molisa (2011) mengutip pemikiran Tolle (2004) yang menyebutkan bahwa:

Explanation of Being points to this two-fold conception of human nature as both immanent and transcendental; as consisting of both form and formlessness. Being is the eternal, ever-present One Life beyond the myriad forms of life that are subject to birth and death.

Dengan asumsi ini, saya melihat terbuka kesempatan untuk mendiskusikan konsepsi manusia secara utuh. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh umat manusia (sebagai makhluk imanen) tidak dapat dilepaskan dari motif, spirit, dan kesadaran yang dimilikinya (yang mencirikan dirinya sebagai makhluk transenden).

Pemahaman atas fenomena yang dikaji dalam penelitian ini dilandasi konsep riset paradigma kritis, yang oleh Burrell dan Morgan diklasifikasikan sebagai *radical humanist* dan *radical structuralist* (1994:22). Paradigma ini memberikan perhatian utama pada upaya untuk mengungkap adanya Praktik alienasi, dominasi, hegemoni, dan eksploitasi pada tatanan masyarakat modern (Andrianto dan Irianto 2008:xx; Fay, 1987:2). Menurut Alvesson dan Skoldberg (2000:110), "*critical theory is characterized by an interpretive approach combined with a pronounced interest in critically disputing actual social realities*". Dua ciri utama yang menjadi karakteristik *critical theory* adalah dimensi interpretif atau hermeneutik (Eriksson dan Kovalainen 2008:268; Giddens 1993:56) dan komitmennya untuk mengkritisi ketegangan dan pertentangan yang merupakan ciri dari tatanan masyarakat modern. Dengan kedua ciri tersebut, *critical theory* juga dikenal dengan *critical hermeneutics* (Alvesson dan Skoldberg 2000:110).

Sebagai '*an outside view*' dari proses dan aktivitas yang terjadi dalam suatu komunitas (Eriksson dan Kovalainen, 2008:261), kekuatan dari *critical research* terletak pada karakternya yang mengedepankan keinginan untuk membebaskan dan mengubah (Al-

vesson dan Skoldberg 2000:114; Eriksson dan Kovalainen 2008:265; Held 1980:16; Triuwono 2006:219). Held (1980:16), misalnya, menegaskan bahwa tujuan utama dari *critical theory* adalah sebagai berikut.

To lay a foundation for an exploration, in an interdisciplinary research context, of questions concerning the conditions which make possible the reproduction and transformation of society, the meaning of culture, and the relation between the individual, society and nature.

Critical theory memperjuangkan terbentuknya tatanan masyarakat yang harmonis, saling menghargai, tercerahkan, berdaya, dan merdeka. Untuk mencapai tujuan emansipatif tersebut, diperlukan adanya perubahan radikal (Burrell dan Morgan, 1994:313). Pandangan tersebut juga berlaku bagi disiplin akuntansi. Akuntan dapat berbagi dengan Kaidonis *et al.* (2009:288) yang berkeyakinan bahwa “*if the emancipation is possible with transformative action, then this possibility must exist*”. Manusia dapat diterangkan, diberdayakan, dan diemansipasi dari situasi opresif yang dialaminya. Perjuangan emansipatif dapat dan harus diupayakan melalui berbagai cara, termasuk melalui jalur riset. *Emancipatory accounting* dapat diharapkan memberikan solusi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, yakni untuk membebaskan dan mengupayakan terjadinya perubahan.

Dalam studi ini, *critical research* diadopsi sebagai pisau analisis. Hal ini dipandang tepat karena pada dasarnya agenda *sustainable development* memiliki ciri-ciri yang selaras dengan pemikiran yang terkandung dalam *critical theory* (Sudana 2014:41-46). Menurut Eriksson dan Kovalainen (2008:269), *critical research* memiliki pada tiga tugas penting, yakni *insight task*, *critique task*, dan *transformative redefinition task*.

Pertama, *insight task* adalah tugas yang diemban oleh *critical research* untuk memahami *current state* dari fenomena yang dikaji. Tugas ini menunjukkan komitmen seorang periset pada ide dasar riset kritis, yakni memperjuangkan emansipasi dan mendorong terjadinya transformasi. Perjuangan tersebut harus diawali dengan pemahaman yang memadai atas *current state of the phenomenon*. Dalam studi ini, *insight task* digunakan untuk memperoleh pemahaman atas

nilai emansipatif yang diperjuangkan dalam agenda *sustainable development*. Tugas ini diupayakan dengan mengadopsi metode *qualitative content analysis* atas sumber tekstual publikasi resmi lembaga-lembaga internasional di bawah naungan *United Nations* yang diberikan mandat untuk terlibat dalam agenda tersebut. *Textual data* yang terkandung dalam sumber tersebut merupakan data yang relevan untuk digunakan sebagai materi kajian, karena (secara teoretis) teks adalah representasi dari realitas. Menurut Eriksson dan Kovalainen (2008:89), “*texts are treated as suitable objects of analysis because we believe in their ability to tell us about what people and issues that they represent*.” Berg (2004:267-269) menjelaskan seperti berikut ini.

Content analysis is not a reductionistic, positivistic approach. Rather, it is a passport to listening to the words of the text and understanding better the perspective(s) of the producers of these words. Qualitative content analysis show how researchers can examine ideological mind-sets, themes, topics, symbols, and similar phenomena, while grounding such examinations to the data.

Karena salah satu tujuan dari studi ini adalah mengkaji nilai emansipatif yang diperjuangkan dalam agenda *sustainable development*, maka *qualitative content analysis* tepat digunakan dalam mengkaji *textual data* dalam sumber kajian.

Kedua, *critique task* berkenaan dengan tugas *critical research* untuk memahami terjadinya alienasi, dominasi, maupun kesenjangan. Tugas ini berkaitan erat dengan komitmen seorang periset pada aspek analitis dalam tradisi riset kritis. Komitmen tersebut adalah menelusuri kemungkinan terjadinya alienasi, dominasi, dan kesenjangan serta menemukan ideologi alternatif yang dapat mengatasi masalah yang terjadi. Aspek analitis tersebut menjadi syarat penting untuk dapat menawarkan *alternative ideology* yang dapat mengatasi *current state of situation*. Dalam studi ini, kebijakan lokal Bali yang bersumber dari ajaran Hindu (yakni THK) diadopsi sebagai *alternative ideology* untuk menjiwai perjuangan emansipatif yang dilakukan. *Critique task* dilakukan dengan mengadopsi *reflective approach* yang mengharuskan untuk dilakukannya suatu

analisis dengan memberikan perhatian pada aspek politik dan retorika dari data empiris yang dikaji (Eriksson dan Kovalainen 2008:vii).

Ketiga, *transformative redefinition task* berkaitan dengan tugas *critical research* untuk menghadirkan konsep tindakan transformatif yang dibutuhkan sesuai dengan *alternative ideology* yang ditawarkan. Tugas ini melingkupi gagasan tentang tindakan sosial dan perspektif pragmatis dalam upaya mendistribusikan pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan akuntansi yang membebaskan. Sebagai implikasi riset, studi ini menawarkan konsep *emancipatory accounting* yang dijiwai oleh spirit THK. Paralel dengan tugas kedua, *transformative redefinition task* juga mengadopsi *reflective approach*, yang memiliki dua karakteristik penting sebagai pedomannya, yakni *careful interpretation* dan *reflection* (Eriksson dan Kovalainen 2008:5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasannya disajikan dalam tiga bagian. Bagian pertama (*insight task*) memuat nilai emansipatif yang diperjuangkan dalam agenda *sustainable development*. Bagian kedua (*critique task*) mendiskusikan kebijakan lokal Bali THK yang diadopsi sebagai *alternative ideology* untuk menjiwai perjuangan emansipatif. Bagian ketiga (*transformative redefinition task*) memuat karakteristik-karakteristik penting *emancipatory accounting* yang dijiwai oleh spirit THK.

Insight task: sustainable development adalah proyek emansipasi. Aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh umat manusia sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya alam. Tidak ada peluang bagi umat manusia untuk melaksanakan pembangunan ekonomi tanpa ketersediaan sumber daya yang berasal dari ekosistem. Prinsip ini berlaku bagi seluruh umat manusia, yakni generasi sebelumnya, sekarang dan yang akan datang. Apabila umat manusia pada suatu generasi melakukan kesalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, maka dampaknya akan dirasakan bukan saja oleh generasi pada zaman tersebut, melainkan juga oleh generasi berikutnya. Oleh sebab itu kita menjadi mudah untuk dipahami mengapa agenda *sustainable development* mensyaratkan keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dalam aktivitas

pembangunan ekonomi. *WCED* (1987:55) menggunakan istilah “*ensuring equitable opportunities for all*” untuk menyatakan betapa pentingnya keselarasan itu terus dijaga, untuk memastikan diperolehnya kesempatan yang sama bagi seluruh umat manusia pada semua generasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, aturan dasar yang harus ditaati adalah pemanfaatan sumber daya alam oleh suatu komunitas tidak boleh menghalangi komunitas lainnya untuk melakukan hal yang sama. Dari sudut pandang kebutuhan lintas generasi, pemanfaatan sumber daya alam oleh suatu generasi tidak boleh menghilangkan kesempatan generasi berikutnya untuk menikmati manfaat tersebut. Aturan dasar ini mengimplikasikan adanya kebutuhan pada semangat emansipasi. Konsep emansipasi merupakan ide penting yang dibutuhkan sebagai pedoman untuk mengupayakan tercapainya keselarasan dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam. *Qualitative content analysis* yang dilakukan atas sumber tekstual menunjukkan bahwa konsep emansipasi dalam agenda *sustainable development* dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni emansipasi kepada ekosistem, kelompok masyarakat yang terpinggirkan pada generasi sekarang (emansipasi intragenerasi), dan generasi mendatang (emansipasi antargenerasi). Tiap-tiap konsep emansipasi tersebut didiskusikan pada bagian-bagian berikutnya.

Emansipasi ekosistem. Ekosistem alam harus dibebaskan dari kewajiban untuk menanggung beban berlebihan yang timbul sebagai akibat dari aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh umat manusia. Apabila beban berlebihan ditimpakan kepada ekosistem, daya dukungnya menjadi semakin lemah. Kondisi demikian membuka peluang bagi terjadinya dampak merugikan dari aktivitas pembangunan. Syarat utama emansipasi kepada ekosistem digariskan oleh *United Nations Millennium Declaration* dengan kalimat yang sangat ringkas, yakni ‘*respect for nature*’. Maknanya adalah sebagai berikut.

Prudence must be shown in the management of all living species and natural resources, in accordance with the precepts of sustainable development (United Nations Millennium Declaration 2000:2).

Dengan memberikan respek yang sepanasnya kepada ekosistem, pembangunan

yang dilakukan oleh umat manusia dapat menghindarkan lingkungan alam dari keharusan untuk menimbulkan *adverse effects* (UNCHE, 1972, prinsip 6 dan 15).

Keharusan untuk memberikan respek kepada *other living beings* juga ditegaskan dalam laporan *WCED* (1987:67) yang mendasari pemikiran untuk dilakukannya upaya konservasi dan perbaikan pada ekosistem dan sumber daya alam. Penegasan yang diberikan oleh Annan (2000:80) ketika itu menjabat *UN Secretary General*. Penegasan ini sangat memadai untuk menunjukkan perlunya emansipasi kepada ekosistem, yakni sebagai berikut.

We must spare no effort to make the UN a more effective instrument in the hands of the world's peoples for pursuing all three of these priorities—the fight against poverty, ignorance and disease; the fight against violence and terror; and the fight against the degradation and destruction of our common home.

Pernyataan tersebut digunakan untuk menegaskan bahwa salah satu perjuangan terpenting umat manusia pada abad milenium adalah peperangan melawan degradasi dan destruksi ekosistem. Ekosistem adalah *our common home* sehingga kelestariannya harus selalu dijaga bagi kepentingan seluruh umat manusia. Umat manusia semestinya berani menyatakan perang kepada siapa pun (termasuk pada dirinya sendiri) yang melakukan degradasi dan destruksi atas ekosistem.

Emansipasi intragenerasi. Selain kepada ekosistem, umat manusia juga dituntut untuk mengimplementasikan konsep emansipasi intragenerasi dalam melakukan aktivitas ekonomi. Emansipasi kepada kelompok-kelompok masyarakat terpinggirkan dapat digunakan untuk menjelaskan perlukannya upaya membangun *intragenerational justice*. Fondasi pemikiran dari konsep ini sangat sederhana. Aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat harus disertai dengan kesadaran bahwa kalangan lainnya harus dibebaskan dari kondisi ketidakmampuan untuk berperan-serta dalam proses pembangunan.

Pengabaian, peminggiran, atau *alienasi* terhadap kelompok-kelompok tertentu akan menghalangi tercapainya sasaran *sustainable development*. Masyarakat yang kurang mampu memiliki ketergantungan sangat tinggi pada sumber daya alam untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya pada aspek pangan. Kemiskinan yang disertai dengan ketidakmampuan mengelola sumber daya alam akan berakibat pada terjadinya aktivitas eksploitasi ekosistem. Apabila jumlah penduduk dunia pada kelompok ini menjadi semakin besar, aktivitas eksploitasi sumber daya alam akan menjadi semakin intensif dan ekstensif.

Eksploitasi secara intensif atas sumber daya alam dipastikan mengganggu kelestarian dan daya dukung ekosistem bagi aktivitas pembangunan ekonomi. Dengan demikian, menjadi sangat masuk akal jika *spirit sustainable development* mensyaratkan dilakukannya upaya emansipatif untuk menjamin tercapainya keadilan intragenerasi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penghentian kolonisasi, dominasi, pendudukan, dan rasisme (UNCED 1992 Prinsip 23; UNCHE 1972 Prinsip 15), bantuan kepada negara-negara miskin (Brundtland 1987:6), dan kompensasi kepada para korban polusi lingkungan (UNCED 1992 Prinsip 13; UNCHE 1972 Prinsip 6 dan 22). Selain itu, emansipasi dan partisipasi patut untuk ditujukan dan diharapkan dari kaum perempuan (Annan 2000:79; UNCED 1992: Prinsip 20), para generasi muda (UNCED 1992:21), dan *indigenous people* (UNCED 1992:22).

Kemampuan kaum perempuan dalam pengelolaan lingkungan tidak boleh diabaikan. Partisipasi mereka sangat penting dalam upaya mencapai sasaran *sustainable development*. Generasi muda pun demikian. Mereka memiliki energi yang besar untuk dimobilisasi ke arah pencapaian sasaran *sustainable development*. *Indigenous people*, yakni para penduduk yang secara tradisional menetap pada suatu kawasan, memiliki pemahaman jauh lebih baik (dan lebih lengkap) daripada siapapun terkait karakter lingkungan yang ditempatinya. Peran mereka dalam mengapresiasi dan mengelola lingkungan alam harus dikedepankan. Untuk mencapai sasaran *sustainable development*, emansipasi intragenerasi dan ekosistem harus diimbangi dengan pemikiran dan tindakan ke arah dikembangkannya emansipasi antargenerasi. Esensinya adalah bahwa generasi sekarang harus mampu memerdekakan generasi berikutnya dari kewajiban menanggung akibat dari kesalahan-kesalahan dalam pemanfaatan ekosistem yang dilakukan dewasa ini.

Emansipasi antargenerasi. “Kekayaan yang menyertai dan dinikmati oleh generasi sekarang bukanlah warisan dari

para leluhur, melainkan titipan dari anak-cucu yang harus dipelihara dengan baik agar dapat sampai ke tangan mereka dengan selamat". Ungkapan ini dapat digunakan sebagai panduan sikap dalam mengelola lingkungan untuk mengembangkan emansipasi antargenerasi. *Words of wisdom* ini adalah pedoman berharga dalam kaitannya dengan etika pemanfaatan sumber daya alam. Pedoman tersebut sangat tepat untuk diadopsi sebagai analogi bagi diperlukannya tindakan emansipatif oleh generasi sekarang kepada generasi berikutnya.

Esensi dari spirit *sustainable development* menyiratkan sebuah makna penting. Praktik pemanfaatan kekayaan alam untuk tujuan pembangunan tidak boleh menghalangi kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan mengadopsi istilah-istilah seperti *future generations, our children and grandchildren*, maupun *our descendants*, konsep emansipasi antargenerasi mendapat perhatian serius dalam berbagai publikasi United Nations yang berkenaan dengan agenda *sustainable development*. Konsep ini dapat ditemukan dalam *Tokyo Declaration* (Brundtland 1987:1), *Our Common Future* (WCED 1987:67), *Rio Declaration* (UNCED 1992: Prinsip 3), Deklarasi Milenium (United Nations Millennium Declaration 2000: paragraf 6 dan 21), dan *Report by UN Secretary General* (Annan, 2000:79).

Diskusi tentang ketiga konsep emansipasi tersebut memberikan pedoman yang sangat berharga bagi seluruh umat manusia. Dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik, umat manusia harus melakukan aktivitas pembangunan. Aktivitas tersebut sangat tergantung pada daya dukung ekosistem yang memberikan sumber daya alam bagi pembangunan. Tanpa daya dukung dari ekosistem, pembangunan mustahil dapat terselenggara. Ketika memanfaatkan sumber daya alam sebagai aset pembangunan, umat manusia wajib membekali dirinya dengan etika yang tepat. Tanpa sikap respek pada ekosistem, umat manusia dapat dengan mudah melakukan *over-exploitation* atas kekayaan yang terkandung dalam ekosistem bumi. Perilaku demikian tidak saja mengakibatkan terdegradasi dan terdestruksinya ekosistem, tetapi juga terganggunya harmonisasi komunitas-komunitas yang menghuninya.

Perilaku tidak etis tersebut pasti sangat merugikan serta akan dirasakan oleh generasi sekarang dan berikutnya. Hal ini harus dipahami oleh seluruh umat manusia.

Sebagai tandem bagi kapasitas transformatifnya, umat manusia dituntut untuk melengkapi dirinya dengan spirit emansipasi kepada ekosistem yang ditempatinya, komunitas-komunitas lain pada generasi sekarang, dan yang akan datang. Sumber-sumber tekstual yang dikaji oleh penulis terkadang ditemukan frasa berikut: *ensuring equitable opportunities for all* (WCED 1987:55); *prudence must be shown in the management of all living species and natural resources* (United Nations Millennium Declaration, 2000:2); dan *fight against the degradation and destruction of our common home* (Annan 2000:80).

Makna yang terkandung dalam frasa tersebut mewakili esensi pemikiran kajian sumber tekstual. Intinya, dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, umat manusia harus membekali dirinya dengan semangat emansipatif. Sebagai rangkuman, esensi pemikiran yang terkandung dalam sumber tekstual yang dikaji dapat dinyatakan dalam kalimat postulatif sebagai berikut:

Postulat nomor 1: Dalam mengupayakan tercapainya sasaran *sustainable development*, semangat dan kesadaran emansipatif (kepada ekosistem, intragenerasi dan antargenerasi) merupakan pedoman utama umat manusia dalam aktivitas pemanfaatan sumber daya alam.

Sebagai syarat bagi tercapainya sasaran *sustainable development*, setiap generasi harus mampu dan mau mengadopsi semangat dan kesadaran emansipatif serta mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran dan tindakan emansipatif harus ditujukan ke segala arah, yakni kepada lingkungan alam, sesama generasi sekarang, dan generasi mendatang. Konsep kesadaran emansipatif akan dapat dipahami dengan lebih baik apabila umat manusia mau menggembleng diri sehingga mampu mencapai tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi.

Critique task: spiritualitas adalah jiwa bagi gerakan emansipasi. Kesadaran emansipatif adalah karakter atau sikap mental yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam mengupayakan tercapainya sasaran agenda *sustainable development*. Molisa (2011) dengan tegas menyatakan bahwa *"emancipation is a core value (if not the core value) of the critical and social accounting*

projects,” dimana agenda *sustainable development* merupakan salah satu tema utamanya. Sebagai sikap mental, kesadaran emansipatif berkaitan erat dengan sisi transenden kehidupan dan aktivitas kehidupan umat manusia. Menurut Molisa (2011), setiap proyek emansipatif yang (dikaji dalam *critical and social accounting*) akan dengan mudah kehilangan pijakannya apabila mengabaikan aspek spiritualitas. Pemikiran ini menunjukkan bahwa kesadaran emansipatif yang dibutuhkan dalam memperjuangkan sasaran *sustainable development* bertumpu pada kemauan umat manusia untuk membangun dan meningkatkan kesadaran spiritualitasnya.

Manusia dan spiritualitasnya. Orr (2002) berkeyakinan bahwa kemauan dan kemampuan dalam mencapai tingkat spiritualitas yang lebih tinggi adalah tantangan sesungguhnya bagi umat manusia dalam upayanya mencapai sasaran-sasaran *sustainable development*. Menurut Orr (2002: 1458-1459), dalam transisi menuju *sustainable development*, pada dasarnya umat manusia dihadapkan pada empat tantangan penting berikut ini.

1. *we need more accurate models, metaphors, and measures to describe the human enterprise relative to the biosphere;*
2. *we need to be aware that the transition to sustainability will require a marked improvement and creativity in the arts of citizenship and governance;*
3. *we need to inform the public through greatly improved education; and*
4. *we need to be aware that the transition to sustainability will require learning how to recognize and resolve divergent problems, which is to say a higher level of spiritual awareness* (Orr 2002: 1458-1459)

Dari keempat tantangan tersebut, Orr (2002) sangat meyakini bahwa poin keempat adalah tantangan sesungguhnya (*the most difficult challenge of all*) yang dihadapi umat manusia. Transisi menuju *sustainable development* membutuhkan dimilikinya pemahaman tentang bagaimana mengenali dan mengatasi masalah-masalah *divergent*. Krisis akibat pola pembangunan yang *unsustainable* pada dasarnya adalah *divergent problems* yang berkembang menjadi *the interlocking crises*, (krisis multi dimensi yang saling terkait erat antara satu dengan yang lain). Manusia yang dibutuhkan untuk mengatasinya kondisi demikian adalah pihak yang berhasil memiliki tingkat kesadaran spiritualitas yang tinggi.

Proklamasi No. 1 dalam *Stockholm Declaration* (UNCHE, 1972) secara cermat menjelaskan posisi unik umat manusia dalam agenda *sustainable development*, seperti di bawah ini.

Man is both creature and moulders of his environment, which gives him physical sustenance and affords him the opportunity for intellectual, moral, social and spiritual growth.

Pernyataan tersebut ditujukan untuk memberikan peringatan bahwa umat manusia dapat berperan, baik sebagai kreator maupun sebagai perusak ekosistem. Hal ini dapat terjadi karena dalam diri setiap manusia terdapat kapasitas transformatif yang tak ubahnya bagaikan pisau bermata dua. Untuk dapat memanfaatkan kapasitas transformatifnya dengan baik, umat manusia wajib mengedukasi diri untuk memperoleh tingkat kesadaran intelektual, moral, sosial, dan spiritual.

Spirit (kata dasar spiritualitas) berasal dari bahasa Latin *spiritus* yang berarti *breadth* atau napas (Miller dan Miller 2008). Dalam konteks ini, spirit dapat dimaknai sebagai napas atau nyawa bagi setiap kehidupan dan setiap aktivitas kehidupan. Spirit juga dikonotasikan dengan *courage, enthusiasm, meaningfulness, dan transcendence* (Miller dan Miller 2008). Setiap kreasi yang diupayakan oleh umat manusia tidak dapat dilepaskan dari unsur spirit dalam dirinya. Miller dan Miller (2008) memaknai spirit sebagai “*the animating principle, the supernatural essence (beyond material nature), which breathes life into creation*”. Oleh sebab itu, sudah seyogianya bila setiap aktivitas kreatif yang dilakukan oleh umat manusia, harus diawali oleh transformasi spiritual ke jenjang kesadaran yang lebih tinggi karena “*spiritual transformation is absolutely vital and unavoidable to the task of human emancipation*” (Molisa 2011).

Walaupun masih sering diperdebatkan apakah spiritualitas dapat disamakan dengan religiusitas (Garner 2003; McDaniel 2003; Orr 2002), satu hal terpenting yang harus dicermati adalah bahwa agama-agama terkemuka di dunia diyakini memiliki kemiripan pada hal-hal yang sangat mendasar. Garner (2003 : 946) sepakat dengan Orr (2002) bahwa:

The ideas at the heart of every major world religion are the very

values suggested we to adopt: wisdom, love, compassion, understanding, and empathy.

Apabila dipraktikkan dengan sungguh-sungguh, prinsip tersebut dapat membawa umat manusia ke dalam perilaku-perilaku yang mendorong tercapainya sasaran *sustainable development* (McDaniel 2003). Dalam prinsip universal tersebut (*wisdom, love, compassion, understanding, dan empathy*), dapat ditemukan nilai emansipasi yang merupakan pedoman utama bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya bersama-sama dengan seluruh komponen ekosistem.

Diskusi yang dikembangkan pada bagian ini memberikan sebuah pemahaman, bahwa langkah-langkah yang diupayakan untuk mencapai sasaran *sustainable development* membutuhkan manusia yang memiliki tingkat kesadaran spiritualitas yang lebih tinggi. Pedomannya dapat ditemukan pada esensi-esensi kebijakan yang terkandung dalam ajaran religius setiap agama terkemuka di dunia. Sebagai kristalisasinya, sebuah kalimat postulatif dapat dibangun dari pemahaman ini, yakni sebagai berikut:

Postulat nomor 2. Perilaku emansipatif yang dibutuhkan untuk mengupayakan tercapainya *sustainable development* mengharuskan umat manusia untuk melakukan upaya penyadaran dan pencerahan sehingga mencapai tingkat kesadaran spiritualitas yang lebih tinggi.

Hal ini mengandung esensi pemikiran yang mengimplikasikan bahwa *sustainable development* pada dasarnya adalah sebuah proyek emansipatif. Setiap proyek emansipatif berlaku aturan fundamental, yakni bahwa keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemauan dan kemampuan umat manusia untuk melakukan *spiritual transformation* untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi.

THK dan transformasi spiritual.

Hindu adalah religi tertua (paling tidak salah satu religi tua) di dunia dan memiliki pengikut yang besar. Selain menarik, saya merasa bahwa penting untuk dipahami bagaimana ajaran Hindu mengenai konsep *spiritual transformation* yang dapat membuat umat manusia memiliki sifat-sifat emansipatif. Merujuk pada Garner (2003) dan Orr (2002), agama Hindu memuat prinsip yang

mengajarkan *wisdom, love, compassion, understanding, dan empathy*. Prinsip universal tersebut mengilhami lahirnya nilai emansipasi yang melandasi terciptanya harmoni kehidupan dalam ekosistem. Wiana (2007:5) menegaskan bahwa dalam kitab-kitab suci Hindu dapat dengan mudah ditemukan ajaran-ajaran harmoni kehidupan.

Dalam konsep THK, manusia adalah unsur sentralnya (Wiana 2005:33, 2007:24). Pemikiran ini memiliki kesamaan dengan pandangan yang diadopsi dalam *sustainable development* (UNCED 1992). Konsep THK mengajarkan bahwa sikap hidup yang benar menurut ajaran Hindu adalah sikap yang seimbang antara percaya dan bakti pada Tuhan (*parahyangan*) dengan menyayangi alam lingkungan (*palemahan*) dan mengabdikan pada sesama manusia (*pawongan*) melalui *yadnya* (Ashrama 2002:24; Wiana 2007:5). Sikap hidup demikian menyebabkan terjaganya hubungan yang harmonis antara manusia dan sistem yang menaungi serta melingkupinya. Ketika harmonisasi terwujud, maka hadirilah kebahagiaan yang dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia. Dengan demikian, pencapaian kebahagiaan yang diperjuangkan oleh umat manusia ditentukan oleh keberhasilannya dalam mengembangkan sikap hidup yang benar, yakni sikap hidup harmonis sesuai dengan konsep THK.

Menurut Windia dan Dewi (2007:2), konsep manusia dalam THK adalah analog dan sepadan dengan sebuah sistem. Pandangan ini sejalan dengan teori holistik atau *system thinking* (Gray, 2002) yang menempatkan manusia sebagai subsistem dari sistem semesta. Perbedaannya terletak pada konsep Tuhan, yang dalam teori holistik tidak dijelaskan secara eksplisit. Dalam THK, konsep Tuhan secara jelas disebutkan sebagai sistem semesta yang menaungi dan melingkupi lingkungan alam, dimana manusia merupakan bagiannya. Dengan berpegang pada pemikiran bahwa spiritualitas merupakan sisi transenden umat manusia, maka konsep sistem dalam THK dapat diterima sebagai konsep harmoni yang komprehensif dan utuh.

THK memberikan petunjuk yang tegas mengenai arah transformasi spiritual yang harus dilakukan oleh umat manusia dalam rangka mengembangkan sikap emansipatif untuk mencapai sasaran *sustainable development*. Setiap langkah yang diambil oleh umat manusia harus merupakan *yadnya* yang dilakukan untuk melestarikan har-

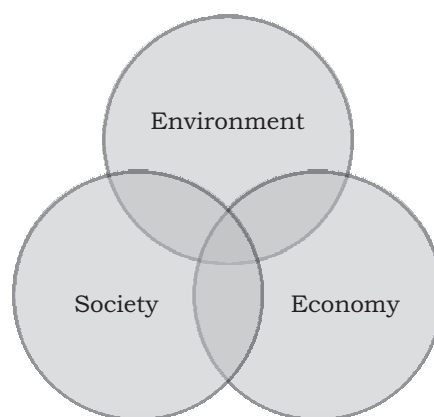
monisasi kehidupan dengan selalu percaya dan bakti pada Tuhan, menyayangi alam lingkungan, dan mengabdikan pada sesama manusia. Apabila THK dipahami sebagai *local wisdom* (Ashrama, 2005:24) dan masyarakat Bali sebagai *indigeneous people, cultural identity* tersebut wajib dilestarikan. Hal ini telah dimandatkan oleh UNCED (1992) dalam Prinsip 9 *Rio Declaration* yang menyatakan bahwa pengetahuan, etika, dan Praktik kehidupan yang telah dikuasai oleh *indigeneous people* (apalagi telah terkristal menjadi kearifan-kearifan lokal) sangat berperan dalam upaya mencapai sasaran *sustainable development*. *Local wisdoms* adalah warisan yang bernilai sangat tinggi sehingga tidak boleh diabaikan, bahkan harus diperkuat dan dilestarikan. Prinsip 9 *Rio Declaration* (UNCED, 1992) juga memberi mandat kepada negara dan organisasi-organisasi internasional agar mampu bekerjasama untuk memperkuat pengetahuan dan kapasitas *indigeneous people* dalam menjaga kearifan-kearifan lokal yang diwarisinya.

Cara pandang integrasi dalam harmoni. Dalam mengupayakan tercapainya sasaran agenda *sustainable development*, saya merasa tindakan transformasi konstruktif yang didahului oleh transformasi spiritual. Proses transformasi tersebut dilaksanakan dengan mengintegrasikan (secara harmonis) pilar-pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan dilandasi oleh tingkat kesadaran spiritual yang tinggi. Proses integrasi pilar-pilar pembangunan dengan kesadaran spiritual harus didasari oleh sebuah cara pandang yang mencerminkan keterkaitan dan keterikatan di antara keempat pilar tersebut.

Menurut Giddings *et al.* (2002), terdapat dua cara pandang dalam memahami hubungan integratif di antara pilar-pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan (Giddings *et al.* tidak mempertimbangkan aspek spiritualitas dalam kajiannya). Cara pandang pertama diberi nama *system intersection view of sustainable development*, dimana hubungan integratif pilar-pilar *sustainable development* diasumsikan mengambil bentuk irisan sistem. Cara pandang Giddings *et al.* (2002) ini dinamakan *three-ring sector view of sustainable development* (Gambar 1).

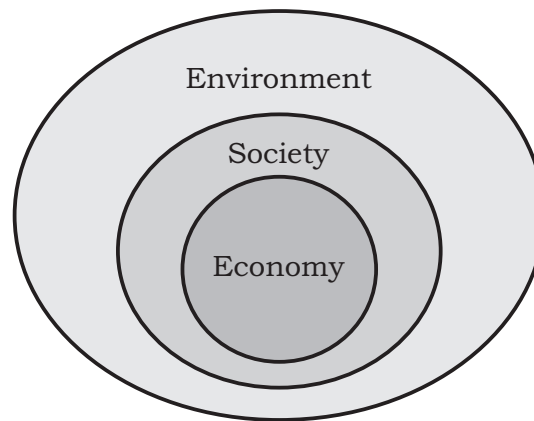
Asumsi implisit yang melekat dalam cara pandang ini adalah bahwa pilar-pilar pembangunan terintegrasi oleh adanya persinggungan atau irisan di antara ketiganya. Dengan cara pandang ini, pilar-pilar pembangunan dipahami sebagai sistem individual yang berdiri sendiri. Persinggungan yang terjadi antara pilar-pilar tersebut (digambarkan sebagai irisan) mewakili konsep pembangunan terpadu yang dilandasi oleh ketiga spirit tersebut. Cara pandang ini tidak sesuai dengan teori holistik atau *system thinking*, yang merupakan fondasi filosofis pemikiran *sustainable development*.

Menurut filosofi teori holistik, aktivitas ekonomi harus dipahami sebagai bagian dari kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh umat manusia. Kegiatan sosial itu sendiri pada akhirnya harus dipahami sebagai bagian dari seluruh aktivitas yang terjadi dalam ekosistem. Yang perlu disadari adalah bahwa ekosistem ini dihuni bukan hanya oleh umat manusia. Dalam istilah Giddings *et al.* (2002), pendekatan ini diberi nama cara pandang *nested sustainable development* (Gambar 2.).



Gambar 1. System Intersection View of Sustainable Development

Sumber: Giddings *et al.* (2002)



Gambar 2. Nested Sustainable Development

Sumber: Giddings *et al.* (2002)

Dalam pendekatan ini, aktivitas ekonomi diasumsikan bersarang (*nested*) dalam kegiatan sosial, kemudian seluruh kegiatan sosial (dimana aktivitas ekonomi adalah bagiannya) bersarang dalam aktivitas ekosistem. Pilar ekonomi harus dipahami bukan sebagai sistem yang mandiri, melainkan sebagai subsistem dari pilar sosial. Adapun pilar sosial (dengan pilar ekonomi sebagai subsistemnya) adalah subsistem dari pilar lingkungan. Cara pandang ini konsisten dengan teori holistik sehingga lebih sesuai dengan konsep integrasi pilar-pilar pembangunan yang diamanatkan dalam agenda *sustainable development*. Walaupun demikian, cara pandang integratif ini masih defisien dalam kaitannya dengan aspek spiritualitas yang merupakan sisi transenden umat manusia.

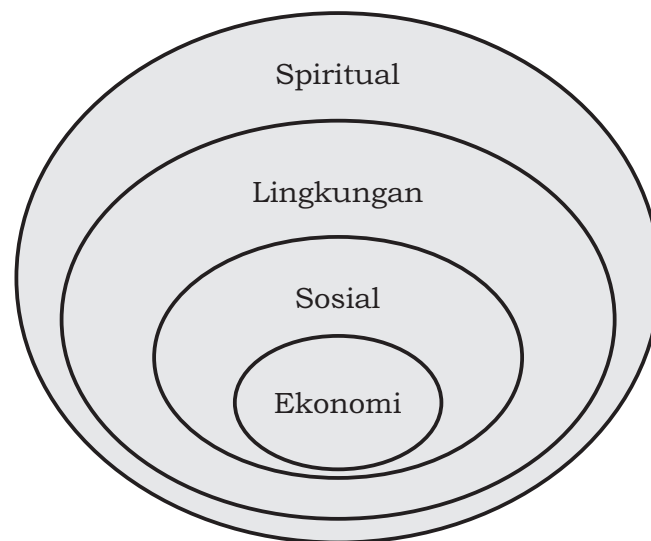
Sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya, agenda *sustainable development* merupakan sebuah proyek emansipasi, dan spiritualitas adalah jiwa bagi setiap gerakan emansipatif. Dengan mempertimbangkan spiritualitas sebagai aspek tak terpisahkan dalam agenda *sustainable development*, pendekatan *nested sustainable development* oleh Giddings *et al.* (2002) dapat dikembangkan menjadi sebuah konsep yang lebih komprehensif dan utuh, yakni *integrated-in-harmony view of sustainable development* (Gambar 3). Dengan cara pandang ini, setiap gagasan dan aktivitas pembangunan harus dikembangkan dengan berpedoman pada kewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual secara utuh.

Para penggagas dan pelaku pembangunan dapat mengadopsi konsep harmonisasi dari kebijakan lokal Bali yang tertuang

dalam ajaran THK. Mereka harus mampu memastikan bahwa aktivitas pembangunan dilakukan secara terintegrasi untuk menjaga harmonisasi umat manusia dengan masyarakat dan lingkungannya yang dilandasi oleh tingkat kesadaran spiritual. Hanya dengan cara demikian, integrasi pilar-pilar pembangunan dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan. Kristalisasi dari pemikiran yang didiskusikan pada bagian ini dapat disarikan dalam sebuah kalimat postulatif sebagai berikut.

Postulat nomor 3. Transformasi spiritual oleh umat manusia ditujukan untuk mengupayakan terpeliharanya kelestarian harmoni kehidupan dengan dipedomani oleh *integrated-in-harmony view of sustainable development*.

Transformative redefinition task: akuntansi yang membebaskan dengan pondasi spirit THK. Salah satu intisari pemikiran yang pada bagian sebelumnya dinyatakan dengan kalimat postulatif nomor 1 menandakan bahwa *sustainable development* adalah sebuah proyek emansipasi. Untuk mencapai sasaran saya memandang bahwa, dibutuhkan umat manusia yang memiliki dan mampu memelihara perilaku-perilaku emansipatif. Untuk dapat memiliki dan mampu memelihara perilaku-perilaku emansipatif, umat manusia harus mau dan mampu melakukan upaya penyadaran dan pencerahan untuk mencapai tingkat kesadaran spiritualitas yang lebih tinggi. Esensi pemikiran ini ditegaskan dalam kalimat postulatif nomor 2. Sasaran terpenting yang diupayakan melalui proyek emansipatif dalam



Gambar 3. *Integrated-in-Harmony View of Sustainable Development*

Sumber: Giddings *et al.* (2002)

agenda *sustainable development* adalah terjaganya kelestarian harmoni kehidupan yang dilakukan dengan mengintegrasikan pilar-pilar pembangunan secara utuh. Melalui kalimat postulatif nomor 3 saya melandaskan bahwa cara pandang yang tepat untuk digunakan dalam memahami konsep integrasi tersebut adalah *integrated-in-harmony view of sustainable development*.

Esensi pemikiran yang tersarikan dalam ketiga kalimat postulatif tersebut merupakan pedoman berharga dalam perjuangan emansipatif untuk mencapai sasaran agenda *sustainable development*. Hal ini harus diupayakan oleh seluruh umat manusia, termasuk para akuntan yang memiliki peran penting khususnya dalam pembangunan ekonomi. Melalui *emancipatory accounting*, para praktisi disiplin akuntansi harus mampu mengupayakan langkah-langkah pencerahan dan peningkatan kesadaran spiritual yang merupakan napas bagi perjuangan emansipatif untuk mencapai sasaran agenda *sustainable development*. Pemikiran ini sejalan dengan konsep-konsep penting yang dieksplikasikan oleh dua orang ahli sebagaimana dapat dicermati dari frasa-frasa berikut, yakni: *to make spiritual realization the heart of its (accounting) practice* (Molisa 2011); *transistion to sustainability will require a higher level of spiritual awareness* (Orr 2002); dan *spiritual transformation is absolutely vital and unavoidable to the task of human emancipation* (Molisa 2011).

Ketiga frasa tersebut menandakan bahwa perjuangan untuk mencapai sasaran-sasaran emansipatif mengharuskan terjadinya transformasi untuk mencapai tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Pemikiran ini bukan merupakan sebuah konsep yang baru. Sekurang-kurangnya, hal ini sudah dinyatakan secara eksplisit oleh UNCHE pada tahun 1972. Dalam Proklamasi No. 1 *Stockholm Declaration*, UNCHE (1972) memberikan rekomendasi bahwa sebagai *creature* dan *moulders* bagi lingkungannya umat manusia diberikan *physical sustenance* yang memberinya *the opportunity for intellectual, moral, social and spiritual growth*. Kesempatan ini tersedia bagi seluruh umat manusia, termasuk para praktisi akuntansi dengan mengembangkan akuntansi yang membebaskan.

Emancipatory accounting dapat didefinisikan sebagai konsep-konsep dan Praktik akuntansi yang dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorong umat manusia (khususnya agen-agen pembangunan ekonomi) untuk menciptakan kemerdekaan bagi alam semesta dan seluruh penghuni ekosistemnya. Sebagai salah satu elemen penting dalam proyek emansipatif, *emancipatory accounting* harus memiliki karakteristik-karakteristik yang merefleksikan ciri-ciri utama perjuangan emansipatif. Hal ini mengimplikasikan bahwa dalam mengembangkan konsep-konsep dan Praktik akuntansi yang membebaskan, esensi-

esensi pemikiran yang telah disarikan dalam kajian ini (dinyatakan dengan tiga kalimat postulatif) harus digunakan sebagai pondasi terpenting.

Karakteristik nomor 1. Postulat nomor 1 memberikan pondasi pemikiran yang menggariskan bahwa dalam mengupayakan tercapainya sasaran agenda *sustainable development*, semangat dan kesadaran emansipatif (kepada ekosistem, intragenerasi dan antargenerasi) merupakan pedoman utama bagi umat manusia dalam aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Eksplorasi atas ekosistem tidak boleh melampaui batas-batas daya dukung yang dimilikinya. Eksplorasi tidak boleh berubah menjadi eksploitasi. Hanya dengan cara demikian umat manusia boleh tetap berharap pada kebaikan-kebaikan alam. Hal ini juga sekaligus membebaskan alam dari keharusan untuk menanggung beban berlebihan.

Keberlanjutan pembangunan juga tergantung dari keberhasilan sekelompok umat manusia untuk membebaskan kelompok lain pada generasi yang sama dari keharusan untuk menanggung ketidakadilan pembagian kue pembangunan. Mereka tidak boleh mengalami ketidakberdayaan dan ketertindasan. Pembangunan yang *sustainable* juga mensyaratkan terciptanya *intragenerational justice*. Generasi sekarang harus mampu membebaskan generasi yang akan datang dari keharusan untuk menanggung beban karena dampak-dampak negatif aktivitas pembangunan yang dilakukan pada masa kini. Mereka juga harus diberikan kesempatan untuk memiliki sumber daya alam yang memadai untuk digunakan pada masanya dan untuk diwariskan kepada generasi berikutnya.

Prinsip emansipasi tersebut harus disadari dan terus-menerus dipraktikkan oleh seluruh umat manusia. Para pelaku bisnis dapat melakukannya dengan mengembangkan *emancipatory business practices*. Melalui *emancipatory accounting*, para praktisi akuntansi dapat menyediakan mekanisme yang dapat memfasilitasi dan mendorong entitas-entitas bisnis untuk mengeksplikasi aktivitas pembangunan bagi kemerdekaan, ekosistem, generasi sekarang dan generasi berikutnya.

Karakteristik *emancipatory accounting* nomor 1

Akuntansi ditujukan dan berperan untuk memberikan infor-

masi tentang kemampuan entitas bisnis dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang membebaskan (ekosistem, intragenerasi dan antargenerasi).

Karakteristik nomor 2. Dalam postulat nomor 2 disebutkan bahwa perilaku emansipatif yang dibutuhkan untuk mengupayakan tercapainya sasaran-sasaran agenda *sustainable development*. Sehingga mengharuskan umat manusia melakukan upaya pencerahan sehingga mencapai tingkat kesadaran spiritualitas yang lebih tinggi. Pemikiran ini merefleksikan konsep dualitas karakter umat manusia, bahwa setiap tindakan yang dilakukannya (sebagai makhluk imanen) ditentukan oleh (dan tidak terpisahkan dari) spirit yang menjiwainya (sebagai makhluk transenden). Tindakan-tindakan emansipatif hanya dapat dilakukan oleh pelaku-pelaku yang memiliki spirit dan jiwa emansipasi. Apabila gerakan emansipatif dipahami sebagai *transformative actions* maka realisasinya memerlukan *antecedent* berupa transformasi spiritual yang diperoleh melalui *education* (Fay 1987:31-32).

Sebagai profesi penting dalam sistem informasi bisnis, akuntansi harus siap memfasilitasi terciptanya *emancipatory business practices* dengan menyediakan informasi akuntansi yang emansipatif. Praktik akuntansi emansipatif harus dipandu dengan regulasi-regulasi yang memiliki karakter emansipatif. Dalam realitasnya, regulasi dibuat oleh *accounting transformers* dalam lingkungan akuntansi melalui proses *accounting policy making*. Pemahaman ini mempertegas adanya kebutuhan untuk dilakukannya transformasi spiritual sehingga disiplin akuntansi memiliki akuntan-akuntan yang berjiwa emansipatif. Hal ini memiliki makna bahwa untuk mengembangkan disiplin akuntansi yang emansipatif harus dilakukan dengan membangun masyarakat akuntansi melalui proses edukasi untuk memperoleh kesadaran emansipatif.

Karakteristik *emancipatory accounting* nomor 2

Akuntansi harus mengambil peran sebagai katalisator bagi terciptanya *emancipatory business practices* dengan terus-menerus mendorong terjadinya transformasi spiritual melalui edukasi bagi para praktisi bisnis dan akuntansi.

Karakteristik nomor 3. Pemikiran penting yang digariskan dalam postulat nomor 3 menunjukkan bahwa transformasi spiritual yang dilakukan oleh umat manusia harus ditujukan untuk menjaga kelestarian harmoni kehidupan dalam ekosistem. Kelestarian ekosistem ditentukan oleh terciptanya harmoni kehidupan, yakni keselarasan di antara para penghuni ekosistem itu sendiri. Postulat ini juga menegaskan bahwa cara pandang yang tepat dalam menjaga kelestarian harmoni kehidupan adalah *integrated-in-harmony view of sustainable development*. Pedoman ini ditemukan dalam konsep harmoni kehidupan yang merupakan esensi dari ajaran kebijakan lokal Bali yang dikenal dengan istilah THK.

Dengan berpedoman pada pemikiran ini, setiap gagasan dan aktivitas pengembangan akuntansi emansipatif harus dipe-domani oleh konsepsi bahwa akuntansi harus memfasilitasi terlaksananya kewajiban entitas bisnis untuk melaksanakan (secara utuh) akuntabilitas-akuntabilitas ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan dilandasi oleh kesadaran spiritual para pelakunya. Pelaku-pelaku bisnis harus didorong untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis dilakukan secara terintegrasi untuk menjaga harmonisasi umat manusia dengan masyarakat dan lingkungannya dengan dilandasi oleh tingkat kesadaran spiritual yang semakin tinggi. Perilaku yang demikian merupakan syarat utama bagi dapat berlangsungnya integrasi pilar-pilar pembangunan secara harmonis dan *sustainable*.

Karakteristik *emancipatory accounting* nomor 3

Akuntansi harus berperan sebagai *business information system* yang mampu memfasilitasi terlaksananya (secara utuh) akuntabilitas-akuntabilitas ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual oleh entitas-entitas bisnis yang ditujukan untuk menjaga kelestarian harmoni kehidupan dengan dipe-domani oleh konsep *integrated-in-harmony view of sustainable development*.

Ketiga karakteristik *emancipatory accounting* tersebut harus dipahami sebagai *basic qualitative characteristics* yang harus dikembangkan dan ditranslasi menjadi kon-

sep-konsep akuntansi yang memedomani pembuatan standar yang meregulasi Praktik akuntansi emansipatif. Sebagai bagian dari umat manusia, para akuntan harus selalu mengingat pernyataan dalam Proklamasi No. 1 *Stockholm Declaration* (UNCHE 1972). Aturan ini ditujukan untuk memberikan peringatan bahwa umat manusia dapat berperan (baik) sebagai kreator (maupun) sebagai perusak ekosistemnya, *creature and moulders of his environment*. Para akuntan harus mampu memanfaatkan kapasitas transformatifnya dengan baik dan wajib mengedukasi diri untuk memperoleh tingkat kesadaran intelektual, moral, sosial, dan spiritual yang lebih tinggi. Hanya dengan cara demikian para akuntan dapat mengambil peran sentral dalam tugas penting bertajuk *sustainable development*. Para akuntan harus merasa tersentuh dan tergerak oleh saran Dillard (1991), bahwa “*we can no longer be satisfied with only interpreting the world; we must become an active catalyst for change*”.

SIMPULAN

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian tentang kaitan antara konsep emansipasi yang diperjuangkan dalam agenda *sustainable development* dan kebijakan lokal Bali yang dilandasi oleh spirit THK serta implikasinya bagi pengembangan *emancipatory accounting*. Dengan mengadopsi *critical research* sebagai pisau analisis, kajian dilakukan dengan berpedoman pada tiga tugas penting dalam *critical research*, yakni *insight task*, *critique task*, dan *transformative redefinition task* (Eriksson dan Kovalainen, 2008:269). Penelitian ini memperoleh empat simpulan.

Pertama, dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk aktivitas pembangunan, umat manusia harus membekali dirinya dengan semangat emansipatif. Apabila pembangunan tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran agenda *sustainable development*, maka aktivitas tersebut harus memiliki pondasi semangat dan kesadaran emansipatif dengan sasaran menciptakan emansipasi bagi ekosistem, emansipasi intragenerasi dan emansipasi antargenerasi.

Kedua, langkah-langkah yang diupayakan untuk mencapai sasaran agenda *sustainable development* membutuhkan manusia memiliki tingkat kesadaran spiritualitas yang tinggi. Hal ini mengharuskan umat manusia untuk melakukan upaya

penyadaran dan pencerahan, karena bagi setiap proyek emansipatif berlaku sebuah aturan fundamental. Aturan tersebut adalah keberhasilan untuk mencapai sasaran *sustainable development* sangat ditentukan oleh kemauan dan kemampuan umat manusia untuk melakukan *spiritual transformation* untuk mencapai tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi.

Ketiga, setiap gagasan dan aktivitas pembangunan harus dipedomani oleh adanya kewajiban untuk melaksanakan (secara utuh) akuntabilitas ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual. Agen-agen pembangunan dapat belajar dari konsep THK, sebuah konsep harmonisasi kehidupan dalam kebijakan lokal Bali. Sebagai agen pembangunan, umat manusia harus mampu memastikan bahwa aktivitas pembangunan dilakukan secara terintegrasi untuk menjaga harmonisasi mereka dengan masyarakat dan lingkungannya dengan dilandasi oleh tingkat kesadaran spiritual yang semakin tinggi. Transformasi spiritual oleh umat manusia yang ditujukan untuk mengupayakan terpeliharanya kelestarian harmoni kehidupan dapat mengadopsi *integrated-in-harmony view of sustainable development* sebagai pedoman.

Keempat, melalui *emancipatory accounting*, para praktisi akuntansi dapat menyediakan mekanisme untuk memfasilitasi dan mendorong entitas-entitas bisnis untuk mengeksplikasi *emancipatory business practices*, *mancipatory business practices* adalah praktik bisnis yang dapat menciptakan kebebasan bagi ekosistem, generasi sekarang dan generasi berikutnya. Untuk dapat memerankan fungsi tersebut, *emancipatory accounting* harus memiliki tiga karakteristik yang sangat mendasar, yakni (1) akuntansi ditujukan dan berperan untuk memberikan informasi tentang kemampuan entitas bisnis dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang memberikan emansipasi kepada ekosistem, intragenerasi dan antargenerasi; (2) akuntansi harus mengambil peran sebagai katalisator bagi terciptanya *emancipatory business practices* dengan terus-menerus mendorong terjadinya transformasi spiritual melalui edukasi bagi para praktisi bisnis dan akuntansi; dan (3) akuntansi harus berperan sebagai *business information system* yang mampu memfasilitasi terlaksananya (secara utuh) akuntabilitas-akuntabilitas ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual oleh entitas-entitas bisnis untuk menjaga kelestarian

harmonis kehidupan dengan dipedomani oleh konsep *integrated-in-harmony view of sustainable development*.

Ketiga *basic qualitative characteristics* yang menjadi ciri utama *emancipatory accounting* harus dikembangkan dan ditranslasi (oleh para *accounting transformers*) menjadi konsep akuntansi yang memedomani pembuatan standar untuk meregulasi Praktik akuntansi emansipatif. Para praktisi akuntansi direkomendasikan untuk mampu memanfaatkan kapasitas transformatifnya dengan baik. Mereka wajib mengedukasi diri untuk memperoleh tingkat kesadaran intelektual, moral, sosial, dan spiritual yang lebih tinggi, sehingga dapat mengambil peran sentral (*become an active catalyst for change*) dalam agenda *sustainable development*.

DAFTAR RUJUKAN

- Alvesson, M. dan K. Skoldber. 2000. *Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research*. SAGE Publication, Inc. London.
- Andrianto, J. dan G. Irianto. 2008. *Akuntansi dan Kekuasaan: (dalam konteks) Bank BUMN Indonesia*. Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Malang.
- Annan, K. A. 2000. *We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century*. United Nations. New York.
- Ashrama, B. 2002. *Buku Panduan Tri Hita Karana di Sekolah dan Kantor Pemerintah*. Bapedalda Propinsi Bali dan Bali Travel News. Denpasar.
- Ashrama, B. 2005. The Essence of THK and Its Referential Teaching. dalam B. Ashrama (Ed.), *Tri Hita Karana, Tourism Awards and Accreditations*. Bali Travel News dan Pemerintah Provinsi Bali. Denpasar.
- Berg, B. L. 2004. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* (5 ed.). Allyn and Bacon. Boston.
- Brundtland, G. H. 1987. *Address at the Final Meeting of World Commission on Environment and Development*. World Commission on Environment and Development. Tokyo.
- Burrell, G., dan G. Morgan. 1994. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. Ashgate Publishing Company. Vermont, U.S.A.
- Dillard, J. F. 1991. Accounting as a Critical Social Science. *Accounting, Auditing dan Accountability Journal*, Vol. 4, No. 1, hlm 8-28.

- Dwirandra, A. A. N. B. 2012. Rekonstruksi Metoda Penilaian Aset dengan Filosofi Tri Hita Karana. *Disertasi tidak Dipublikasikan*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Eriksson, P. dan A. Kovalainen. 2008. *Qualitative Methods in Business Research*. SAGE Publications, Ltd. London.
- Fay, B. 1987. *Critical Social Science: Liberation and Its Limits*. Cornell University Press. Ithaca, New York.
- Gaffikin, M. 2008. *Accounting Theory: Research, Regulation, and Accounting Practice*. Pearson Education Australia. NSW, Australia.
- Garner, A. 2003. "Spirituality and Sustainability: A Letter". *Conservation Biology*, Vol 17, No. 4, hlm 946-947.
- Giddens, A. 1993. *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies* (E. Adinugraha dan Wahmuji, Trans. 2 ed.). Stanford University Press. California.
- Giddings, B., B. Hopwood, dan G. O'Brien. 2002. "Environment, Economy and Society: Fitting Them Together into Sustainable Development". *Sustainable Development*, Vol.10, hlm 187-196.
- Gray, R. 2002. "Of Messiness, Systems, and Sustainability: Towards a More Social and Environmental Finance and Accounting". *British Accounting Review*, Vol. 34, hlm 357-358.
- Held, D. 1980. *Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas*. University of California Press. Los Angeles.
- Kaidonis, M. L. Moerman, dan K. Rudkin, 2009. "Paradigm, Paradox, Paralysis: An Epistemic Process". *Accounting Forum*, Vol 33, hlm 285-289.
- McDaniel, J. 2003. "Spirituality and Sustainability: A Letter". *Conservation Biology*, Vol. 17, No. 4, hlm 946-947.
- Miller, W. C. dan Miller, D. R. 2008. Spirituality: The Emerging Context for Business Leadership (Publikasi dari Global Dharma Center: www.globaldharma.org, diunduh Mei 2013).
- Molisa, P. 2011. "A Spiritual Reflection on Emancipation and Accounting". *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 22, hlm 453-484.
- Orr, D. W. 2002. "Four Challenges of Sustainability". *Conservation Biology*, Vol 16, No. 6, hlm 1457-1460.
- Prabhupada, S. S. A. C. B. S. 1972. *Bhagavadgita-gita As It Is: The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.*
- Shapiro, B. 2009. A Comparative Analysis of Theological and Critical Perspectives on Emancipatory Praxis through Accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, Vol 20, hlm 944-955.
- Sudana, I. P. 2014. Transformasi Laporan Keuangan Entitas Bisnis dengan Spirit Sustainable Development. *Disertasi tidak Dipublikasikan*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Sudarma, M. 2013. "Revealing the Agency Cost, Management Behavior in the Practice of Tri Hita Karana Culture (A Study at LPD of Pakraman Village in Denpasar Bali)". *IOSR Journal of Business and Management*, Vol. 10, No. 5, hlm 54-61.
- Triyuwono, I. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- UNCED. 1992. Rio Declaration on Environment and Development. *United Nations Conference on Environment and Development*.
- UNCHE. 1972. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. *United Nations Conference on the Human Environment*. Stockholm.
- United Nations Millennium Declaration*. 2000. (No. A/RES/55/2). United Nations General Assembly. New York.
- WCED. 1987. *Report of the World Commission on Environment and Development: "Our Common Future"* (No. A/42/427). World Commission on Environment and Development. Tokyo.
- Wiana, I. K. 2005. Humans as a Central Element in THK. In B. Ashrama (Ed.), *Tri Hita Karana, Tourism Awards and Accreditations*. Bali Travel News dan Pemerintah Provinsi Bali. Denpasar.
- Wiana, I. K. 2007. *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Paramita. Surabaya.
- Windia, W. dan R.K. Dewi. 2007. *Analisis Bisnis yang Berlandaskan Tri Hita Karana*. Penerbit Universitas Udayana. Denpasar.
- Wirawan, I. M. A. 2011. *Tri Hita Karana, Kajian Teologi, Sosiologi dan Ekologi Menurut Veda*. Paramita. Surabaya.